





harga mati ancam para buruh tersebut dan tidak dapat diubah. Para massa aksi demonstrasi terus bertambah dan membanjiri Jalan Gubernur Suryo. Gedung Grahadi pun dipagari dengan kawat berduri dan dijaga ketat oleh ratusan personel baik dari Polda Jawa Timur maupun Polrestabes Surabaya, agar para massa tidak dapat melewati batas yang telah ditetapkan.

Belum adanya kata sepakat soal penetapan angka kenaikan upah minimum kabupaten atau kota (UMK) Tahun 2015 di Jawa Timur, ribuan buruh kembali mengepung Gedung Grahadi Surabaya di Jalan Gubernur Suryo, Kamis (20/11). Para buruh dari berbagai elemen ini, meminta Gubernur Jawa Timur, **Soekarwo** menetapkan angka Rp 3 juta di ring satu dan Rp 2,7 juta di ring dua. Angka UMK yang baru itu, menurut para buruh, berdasarkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan Presiden **Jokowi** Senin (17/11) malam dan berlaku pada 18 November pukul 00.00 WIB. Aksi turun jalan yang digelar para buruh hari ini, berbeda dengan Rabu kemarin. Jika pada Rabu kemarin, mereka hanya berorasi saja, hari ini mereka beraksi dengan menyelengi hiburan tari Kuda Lumping. Sementara dalam orasinya, para buruh mengatakan, sebagai dampak kenaikan harga BBM, maka nilai UMK 2015 juga harus dinaikkan. "Kami menuntut angka UMK 2015 senilai Rp 3 juta. Jumlah itu sangat realistis sesuai dengan kenaikan harga BBM yang otomatis berimbas dengan harga-harga kebutuhan pokok," ujar salah satu orator.

Dalam orasinya, para buruh juga mengatakan, aksi yang digelarnya kali ini, merupakan aksi susulan yang dilakukan pada Rabu kemarin. Sebab, saat dilakukan mediasi dengan gubernur kemarin belum ada kata sepakat. Pengumuman penetapan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Tahun 2015, akan dilakukan pada 21 November besok. "Untuk itu, kita kembali melakukan aksi hari ini untuk mengawal UMK Tahun 2015". Dan mendesak Pakde Karwo (Soekarwo) untuk menetapkan angka yang sudah direkomendasi oleh kabupaten masing-masing. Para buruh juga mengaku menolak usulan Pakde Karwo yang menyampaikan angka Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2015 di Kota Surabaya idealnya adalah Rp 2,5 juta.



ini menginginkan kebijakan yang bisa mengubah tingkatan kehidupannya yang semakin sulit dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang dikira kurang bisa membantu kebutuhan hidupnya.

Dan karena itu juga, banyak kejadian demonstrasi yang tak terduga ketika para buruh kurang puas dengan respon dari para pemerintah yang belum bisa menanggapi apa yang diinginkan oleh para buruh-buruh ini. Banyak faktor yang menyebabkan para buruh melakukan demonstrasi, ketika gaji para buruh tidak sesuai, dengan kenaikan BBM dan kehidupan sehari-hari yang semakin meningkat maka dari itu para buruh menuntut kebijakan Kenaikan Upah Minimum Regional ini agar kehidupan para buruh bisa layak dan sejahtera. Karena dalam perjanjian perusahaan tersebut bisa memberikan kesejahteraan bagi para buruh.

Dalam berdemo ini pasti ada yang namanya sebab-akibatnya dan akibat dari melakukan demonstrasi ini bisa berdampak buruk bagi para buruh, ada yang diberikan sanksi oleh perusahaannya, di skors, di pindahkan tempatkan ke perusahaan lainnya / cabang lainnya atau mungkin sampai dikeluarkan dari perusahaan yang mereka tempati. Dan ada pula yang mengatakan bahwa demonstrasi itu sudah diatur dalam UU, dan setiap orang punya hak dalam menyampaikan aspirasinya. Dan tidak ada sanksi bagi karyawan karena hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha bisa berjalan dengan baik, dan selalu mengedepankan konsep dan lobi karena demo sebenarnya adalah opsi terakhir ketika tidak ada win-win solusi bagi kedua belah pihak. Sebenarnya para buruh juga sudah capek dengan adanya demonstrasi yang terus-menerus ini, apabila tidak melakukan demonstrasi maka buruh akan patuh dengan semua keputusan yang

telah ditetapkan, jadinya para buruh akhirnya melakukan demonstrasi tersebut dengan kondisi apapun agar aspirasinya tersampaikan.

Sebagaimana didalam hal ini peneliti memfokuskan masalah yang berhubungan dengan bagaimana proses terjadinya aksi demonstrasi tersebut dan bagaimana dampak yang akan diterima oleh buruh setelah melakukan aksi demonstrasi. Untuk memahami suatu permasalahan yang terjadi dikalangan buruh ini, maka diperlukan suatu penyelesaian yang membawa mereka pada tahapan tentang pemahaman teori konflik Karl Marx. Sebagaimana dalam bentuk permasalahan tersebut dapat dilihat dalam bentuk penjabaran teori konflik yang dikatakan Karl Marx untuk mendapatkan sebuah penyelesaian. Karena permasalahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat ini adalah sesuatu yang wajar dan akan selalu senantiasa ada dalam setiap keseharian kita.

Kajian penelitian yang peneliti ambil ini lebih terfokuskan pada kajian tentang konflik sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat sekitar. Dalam hal ini peneliti menganalisis tentang kondisi para buruh PT. Parin yang berdemonstrasi dan tergabung dalam organisasi FSPMI, dimana hal ini terkait dengan sebuah konflik sosial yang timbul dilingkungan sekitar kita. Peneliti tertarik dengan kajian diatas karena aksi demonstrasi yang terjadi dikalangan buruh ini merupakan pembahasan yang sangat menarik untuk diketahui dan disaat ini pula demonstrasi adalah suatu pembahasan yang sedang menjadi trending topik dikalangan buruh dan masyarakat.











kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan cenderung diberikan kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia.

Buruh berbeda dengan pekerja. Pengertian pekerja lebih menunjuk pada proses dan bersifat mandiri. Bisa saja pekerja itu bekerja untuk dirinya dan menggaji dirinya sendiri pula. Contoh pekerja ini antara lain petani, nelayan, dokter yang dalam prosesnya pekerja memperoleh nilai tambah dari proses penciptaan nilai tambah yang mereka buat sendiri. Istilah tenaga kerja dipopulerkan oleh pemerintah orde baru, untuk mengganti kata buruh yang mereka anggap kekiri-kirian dan radikal.

PT. Parin adalah sebuah industri yang didalamnya terdapat yang namanya pemilik modal dan kelompok buruh. Yang mana buruh ini melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh pihak perusahaan untuk memproduksi barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan, dan buruh PT. Parin ini dipekerjakan sebagai pegawai yang bisa menghasilkan kualitas barang yang baik seperti barang elektronik yang canggih yaitu sparepart mobil juga komponen industri lain yang terbuat dari logam. Buruh ini melakukan pekerjaan agar bisa mendapatkan upah yang dihasilkan dari kerja keras mereka selama bekerja dalam perindustrian.







diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu eksplisit.

Adanya demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi FSPMI yang bekerja di PT. Parin dan perindustrian lain ini untuk bisa menuntut hak-haknya sebagai buruh yang belum bisa terpenuhi oleh pihak perusahaan, juga untuk mendapatkan sebuah kebijakan yang bisa mengubah tingkatan kehidupannya dari keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintahan maupun dari pihak perusahaan sendiri. Karena dari sebuah kebijakan-kebijakan yang didapatkan ini buruh bisa menerima hak-haknya yang sebelumnya belum terpenuhi dan bisa mendapatkan kesejahteraan yang didapatkan dari kebijakan yang ditetapkan.

#### **4. Upah Minimum Regional (UMR)**

UMR (Upah Minimum Regional) adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Menurut Permen No. 1 Th. 1999

Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.

Upah Minimum Regional yang dituntut oleh para buruh ini tidak semata-mata ditetapkan oleh buruh begitu saja, namun para buruh FSPMI ini melakukan survey terlebih dahulu untuk bisa menetapkan tuntutan yang para buruh ini ajukan ke pihak-pihak pemerintahan. Karena upah yang mereka terima saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan hidup layak, juga belum bisa mesejahterakan kehidupan keluarga para buruh masing-masing. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan seharusnya pihak-pihak yang memiliki modal bisa memberikan hak-hak buruh yang belum mereka terima dengan apa yang telah ditetapkan.

#### **F. Telaah Pustaka**

Berdasarkan pada gambaran umum tema penelitian yang berhubungan dengan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu "*Buruh dan Gerakan Sosial (Studi tentang Demonstrasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam Menyikapi Kebijakan Pemerintah Provinsi tentang Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Sidoarjo*)". Sebagaimana gambaran umum didalam tema penelitian tersebut adalah yang berhubungan dengan proses demonstrasi dan



dampak yang didapat setelah melakukan aksi demonstrasi. Sebagai rujukan dari penelusuran hasil penelitian yang terkait dengan tema yang diteliti, peneliti berusaha mencari referensi hasil penelitian yang di kaji peneliti terdahulu sehingga membantu peneliti dalam mengkaji tema yang akan diteliti. Selain itu hasil penelitian yang terdahulu akan dapat di ketahui pemasalahannya. Dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dan sesuai dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan sekarang adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh *Muhammad Habibulloh* dengan judul penelitian “*Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Masyarakat Buruh : Deskripsi Kebijakan Pemerintah terhadap Tenaga Kerja*” dengan lokasi penelitian di Sidoarjo<sup>6</sup>. Pada tahun 2006, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menjelaskan peran pemerintah itu terwujud melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan dalam implementasinya adalah pengendalian dan mengatur hubungan para pekerja dengan pengusaha dengan bukti penyelesaian konflik PT. Kasogi dan PT. Kuda Laut. Kebijakan Pemerintah Daerah Tk. II Sidoarjo terhadap tenaga kerja adalah bagian dari pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat adalah pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Dan juga Kebijakan pemerintah Sidoarjo terkait UMK sudah sesuai dengan kondisi riil daerah Sidoarjo dengan penyesuaian terhadap

---

<sup>6</sup>Muhammad Habibulloh, “*Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Masyarakat Buruh : Deskripsi Kebijakan Pemerintah terhadap Tenaga Kerja*”, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).



Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan proses penetapan ini dimulai dari penyusunan tim survei oleh Dewan Pengupahan untuk meninjau langsung ke pasar berkenaan dengan harga kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan ukuran pria/wanita lajang sesuai dengan Permenakertrans No. PER/17/MEN/VII/2005 tentang Komponen dan pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

3. Tulisan yang terbentuk jurnal yang ditulis oleh *Firza Maududi, Holis Abdul Ajim dan Muchammad Riswanda*.<sup>8</sup> Ditulis pada tahun 2013 dan berasal dari Jurusan Sosiologi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Dengan judul penelitian “*Tuntutan Buruh Mengenai Kenaikkan Upah Minimum*” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Kajian yang dibahas didalam jurnal ini adalah mengenai perjalanan kaum buruh dalam tekanan para pemilik modal yang terus langgeng, bahkan tekanan-tekanan terhadap buruh seringkali di legitimasi oleh penguasa Negara melalui peraturan-peraturan Negara, yakni undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pengganti UU, peraturan daerah, dan juga melalui keputusan-keputusan menteri, hal ini dapat terjadi karena bersepakatnya antara pemilik modal dengan pemegang kekuasaan, yang kemudian berakibat kepada keterpurukan nasib buruh yang tidak jelas. Negara menjadi suatu alat penindas kaum buruh dengan segala kakitangannya didalamnya yaitu penguasa komprador (pemerintah), kapitalis birokrat tuan tanah-tuan tanah besar.

---

<sup>8</sup>Firza Maududi et. al, “*Tuntutan Buruh Mengenai Kenaikkan Upah Minimum*”, (Jurusan Sosiologi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta : 2013).  
[Holisfcb.blogspot.com/2013/06/makalah-jurnal-tuntutan-buruh-mengenai.html?m=1](http://Holisfcb.blogspot.com/2013/06/makalah-jurnal-tuntutan-buruh-mengenai.html?m=1).

Yang dampaknya adalah rakyat yang dijadikan tumbal keserakahannya, termasuk didalamnya adalah kaum buruh yang dijadikan semata-mata alat/mesin pencipta keuntungan/kekayaan semata bagi mereka. Nasibnya terus tertindas dan dihisap sehingga ketergantungan pada kaum pemodal/kapitalis.

4. Hasil penelitian yang ditulis oleh *Eko Prasetyawan, Fajar Surya Permana, Umbu Aefans Rawambaku dan Les Pratama*.<sup>9</sup> Ditulis pada tahun 2013 dan berasal dari Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan Bogor. Dengan judul penelitian “*Tuntutan Buruh terhadap Ketentuan Upah Minimum di Indonesia*”, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Kajian yang dibahas dalam karya tulis ini adalah dalam keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten tersebut dicantumkan bahwa produktivitas menjadi salah satu pertimbangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja. Hal ini dapat diartikan bahwa upah yang diberikan hendaknya dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Tentu saja akan lebih tinggi dibandingkan karyawan yang kurang produktif. Di sisi lain uang masih merupakan motivator ampuh untuk mengajak karyawan bekerja lebih baik lagi. Oleh karena itu produktivitas merupakan rasio antara output dan input, maka definisi upah minimum dalam keputusan Gubernur tersebut, akan lebih baik bila memasukkan unsur gaji variabel. Karena seringkali praktik penggajian di banyak perusahaan justru memasukkan unsur variabel yang lebih lengkap

---

<sup>9</sup>Eko Prasetyawan et. al, “*Tuntutan Buruh terhadap Ketentuan Upah Minimum di Indonesia*”, (Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan : 2013).  
[Ekoprasetyawan.blogspot.com/2013/11/makalah-msdm-tuntutan-buruh-terhadap.html?m=1](http://Ekoprasetyawan.blogspot.com/2013/11/makalah-msdm-tuntutan-buruh-terhadap.html?m=1)

seperti misalnya uang transport, uang makan, uang hadir dan bentuk insentif lainnya yang lebih didasarkan pada kinerja karyawan. Dalam penentuan upah pokok biasanya didasarkan atas tingkat pendidikan dan masa kerja. Ada sebagian perusahaan masih memiliki karyawan dengan pendidikan lebih rendah dari pendidikan yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Sebagai dampak keputusan manajemen beberapa tahun sebelumnya ternyata untuk melakukan penyesuaian gaji mereka dengan adanya Upah Minimum Kabupaten yang baru, juga tidak mudah sehingga terkesan upah mereka masih dibawa Upah Minimum Kabupaten. Padahal kenyataannya gaji yang mereka terima sudah melebihi Upah Minimum Kabupaten dikarenakan adanya beberapa bentuk penggajian yang bersifat variabel tadi.

Berdasarkan hasil karya yang telah dijadikan sebagai penelitian terdahulu oleh peneliti yang mana mengkaji tentang Upah Minimum Kabupaten. Pada hasil skripsi tersebut, memiliki perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti. Didalam penulisan karya yang berupa skripsi, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya dapat dilihat bahwa kajian yang peneliti angkat tentang proses demonstrasi FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) dalam menyikapi kebijakan UMR (Upah Minimum Regional).

Dalam hal ini kajian peneliti bersifat general dan umum, akan tetapi kajian yang peneliti ambil lebih berhubungan dengan proses sebelum terjadinya demonstrasi, proses demonstrasi disini dimaksudkan adalah awal dari sebelum demonstrasi tersebut terjadi dan bagaimana para buruh menindak lanjuti sebuah

solusi yang terbaik sebelum demonstrasi ini terjadi. Yang mana dari sebuah demonstrasi tersebut dapat membawa perubahan yang akan berdampak pada kesejahteraan para buruh dan masyarakat yang ada. Karena demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh itu untuk mendapatkan hak-hak mereka yang belum bisa diperoleh dari pihak-pihak perusahaan ataupun pihak pemerintah yang menetapkan segala peraturan tanpa mempertimbangkan dampak apa yang akan terjadi dimasyarakat nantinya.

Sebagaimana dapat dilihat akan letak perbedaan kajian yang peneliti angkat dari penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu dengan tujuan untuk membandingkan antara kajian yang peneliti ambil dengan kajian yang terdapat pada penelitian terdahulu. Dan dalam penelitian yang peneliti kaji tentang demonstrasi buruh tentang UMR ini sendiri menggunakan prespektif dalam teori konflik sosial yang mana berkaitan dengan fenomena sosial yang berada di lokasi penelitian, sehingga dapat diketahui perbedaan dari penelitian tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara atau proses yang digunakan didalam melakukan penelitian. Sebagaimana metode penelitian dibutuhkan oleh peneliti untuk tahapan didalam melakukan penelitian. Menurut Dedy Mulyanna metode adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati







bekerja dalam sebuah perusahaan. Namun peneliti lebih memilih mengambil di PT. Parin. Walau permasalahan yang terdapat pada perindustrian ini banyak terjadi dan hampir sama dengan perindustrian-perindustrian lainnya namun permasalahan yang mereka tujukan yaitu tentang kebijakan pemerintah dalam menaikkan Upah Minimum Regional untuk Kebutuhan Hidup Layak yang akan didapatkan oleh para buruh.

Maka dari itu lokasi penelitian yang peneliti ambil adalah dari beberapa buruh yang tergabung dalam organisasi FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) yang bekerja di PT. Parin (Pakarti Riken) yang berlokasi di Jl. Sukodono Gedangan Sidoarjo. Yang memiliki basecamp sendiri untuk berkumpul dan mempererat organisasi tersebut dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang telah dibentuk.

Sehubungan dengan lokasi yang telah dipilih oleh peneliti maka peneliti memilih obyek penelitian yang tergabung dengan organisasi serikat buruh yang bekerja di PT. Parin yang bertempat di Gedangan Sidoarjo. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena di daerah tersebut terdapat perindustrian yang didalamnya terbentuk sebuah organisasi yang bisa memperjuangkan hak-hak mereka dengan mendirikan berbagai macam organisasi, namun peneliti lebih condong kepada organisasi FSPMI yang memiliki peran yang cukup berpengaruh daripada organisasi-organisasi lainnya.



Tabel 1.2  
Daftar Nama-Nama Informan

No	Nama	Jabatan / Status
1	Yusak	Pimpinan Cabang
2	Anam	Ketua FSPMI
3	Wanto	Sekretaris PC
4	Hendro	Anggota FSPMI
5	Bambang	Anggota FSPMI
6	Narwoko	Anggota FSPMI
7	Danang	Anggota FSPMI
8	Lusy	Staff Manager HRD
9	Budi	Pegawai Disnaker











merekam apa yang telah disampaikan oleh informan yang diteliti, kemudian menindak lanjuti dengan pertanyaan tambahan yang terkait dengan judul yang peneliti buat. Dalam melakukan wawancara juga harus menggunakan panduan atau pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sesuai dengan fokus penelitian.

- b. Observasi, merupakan teknik yang dilakukan peneliti dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas keseharian subyek yang diteliti untuk mendekatkan diri antara peneliti dan yang diteliti. Dan teknik ini bertujuan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan peneliti dapat mendiskripsikan setting yang ditelitinya, yaitu mencari tahu tentang bagaimana proses dan dampak yang telah terjadi selama para buruh melakukan demonstrasi.
- c. Teknik dokumenter, Dalam upaya pengumpulan data dengan cara dokumentasi peneliti menelusuri berbagai macam dokumen antara lain buku, majalah, koran, profil ataupun sumber informasi lain. Untuk melakukan penelusuran ini digunakan pedoman tentang apa yang hendak ditelusuri baik itu subyek, gejala maupun tanda-tanda. Tekhnik dokumentasi yaitu tehnik yang digunakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,











